

EFISIENSI DAN KESINAMBUNGAN FINANSIAL LEMBAGA KREDIT MIKRO NON BANK

Khusnul Ashar

Fakultas Ekonomi Universitas Brwajaya

This study aims to know the degree of efficiency and continuity of non-bank micro credit financial institution (MFIs). In average when the number of members reaching 1200 people. This project is at break-even point (BEP). Also found that with as many as 2000 members and the range of loan around 150 thousand rupiahs to USD 175 thousand rupiahs, the project can cover 85% of total costs including the imputed cost. Level of ability of this institution is largely determined by the quality of human resources involved in this activity; both the level of human resources at Head Office or in the member level. To foster and develop poverty community business, the appropriate institute character is not bureaucratic, flexible, bottom-up, independent, has a pattern of clear planning and evaluation and has the ability to build a mental attitude of small entrepreneurs to success entrepreneurs.

Keywords: *financing, non-bank credit institutions, efficiency*

A. LATAR BELAKANG

Dewasa ini gerakan pemberdayaan usaha ekonomi skala kecil dalam rangka pengentasan kemiskinan merupakan salah satu agenda pembangunan yang sangat penting di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Kebijakan pemerintah dengan berbagai program yang didanai oleh lembaga-lembaga internasional dengan jumlah yang sangat besar membuktikan begitu seriusnya persoalan kemiskinan dan pemberdayaan usaha kecil ini.

Keberadaan lembaga-lembaga kredit mikro yang dikelola secara mandiri oleh LSM merupakan fenomena menarik untuk dikaji lebih jauh mengingat peranannya yang cukup besar dalam mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat melalui skema perkreditan. Perhatian lembaga-lembaga donor internasional seperti Bank Dunia (CGAP), ADB maupun UNDP terhadap lembaga-lembaga semacam ini cukup besar dengan bukti banyaknya dana internasional yang diterima oleh LSM yang bergerak dalam bidang kredit mikro. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi dan derajat kesinambungan finansial lembaga kredit mikro (LKM) non bank,

B. KERANGKA TEORITIS

Lembaga Kredit Mikro di Indonesia

Kebijakan perbankan untuk meningkatkan pelayanan kredit kepada golongan masyarakat miskin telah banyak dilakukan. Berbagai program kredit usaha kecil, seperti Kredit Investasi Kecil (KCK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) pada tahun 1974, Kredit Canda Kulak (KCK) dan Kredit Inpres pada tahun 1976, serta beberapa program kredit lainnya telah disalurkan melalui bank-bank umum, BRI dan Koperasi Unit Desa. Pada tahun 1988 terbit keputusan Presiden RI Nomor 38

yang mengatur Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai istilah resmi untuk lembaga-lembaga perkreditan masyarakat kecil yang telah lama ada seperti Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Pasar dan sebagainya. Sedangkan paket kebijaksanaan (Pakjan) 29 Januari 1990 merupakan paket reformasi kredit yang mewajibkan antara lain bank-bank menyalurkan 20% kreditnya untuk usaha kecil yang dikenal sebagai Kredit Usaka Kecil (KUK) (Pandu Suharto, 1991).

Mengamati pelaksanaan Pakjan 1990 tentang keharusan bank menyalurkan minimal 20% kreditnya dalam bentuk KUK, seperti tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa bank belum menyalurkan kredit kepada pengusaha kecil. Sampai tahun 1994 secara keseluruhan bank-bank telah menyalurkan KUK tidak kurang dari 26 %. Namun banyak pakar masih meragukan apakah penyaluran KUK tersebut telah benar-benar sampai pada pengusaha kecil (Masassya, 1994), terutama mengingat batasan pengusaha kecil menurut kriteria perbankan adalah pengusaha yang memiliki aset sampai 600 juta rupiah.

Dilihat dari proporsi besarnya kredit kecil terhadap seluruh kredit yang tersalur, tampak bahwa penyaluran kredit kecil dapat dikatakan belum menjangkau masyarakat miskin sebagaimana yang diharapkan. Jumlah kredit kecil, termasuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR), selama tahun 1974 - 1986 hanya sekitar 5-20 persen dari jumlah kredit perbankan. Kredit yang disalurkan oleh BPR, bentuk bank khusus yang melayani usaha kecil golongan ekonomi lemah atau sektor informal, antara tahun 1974-1986 baru berkisar antara 0,3-13 persen dari seluruh kredit perbankan (Pandu Suharto, 1991). Karena batasan pengusaha kecil menurut kriteria perbankan adalah pengusaha yang mempunyai aset sampai 600 juta rupiah, maka besar kemungkinan penyaluran kredit kecil yang benar-benar sampai ke masyarakat miskin adalah jauh lebih kecil lagi. Sedangkan di lain pihak berdasarkan data Susenas tahun 1987, dari 9,27 juta perusahaan yang didata 98,5 persen (9,1 juta) terdiri dari pengusaha yang tergolong pengusaha sektor informal.

Namun demikian, bila perkembangan masing-masing bentuk perkreditan untuk rakyat kecil diamati secara parsial, beberapa bentuk penyaluran kredit yang telah disesuaikan dengan sifat permasalahan pengusaha kecil menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Kredit Investasi Kecil (KIK) maupun Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), yang pada tahun 1974 posisi nilai realisasinya sebesar 26 milyar rupiah, meningkat menjadi 1,25 trilyun rupiah pada tahun 1983 dan selanjutnya menjadi 2,534 trilyun rupiah (April 1990). Kredit Mini dan Midi, yang ditujukan untuk golongan miskin, seperti petani gurem, buruh tani, pedagang, pengrajin dan nelayan juga menunjukkan perkembangan yang sangat pesat (Rachbini, 1994).

Hasil penelitian dari Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK) UGM menunjukkan beberapa badan kredit pedesaan seperti Bank Kredit Kecamatan (BKK) di Jawa Timur, Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK) di Jawa Timur dan Lumbung Pitih Nagari (LPN) di Sumatra Barat terbilang berhasil menyalurkan kredit di pedesaan. Badan-badan kredit pedesaan itu memberikan persyaratan kredit yang mudah, prosedur yang sederhana, pencairan kredit yang tepat, lokasi yang dekat serta biaya relatif ringan. Dalam hal agunan, tidak harus tersedia jaminan, melainkan lebih memperhatikan karakter peminjam. Sedangkan di Sumatra Barat ada tambahan jaminan dari 'tetua' si peminjam yang disebut 'datuk'. salah satu unsur yang dianggap penting bagi keberhasilan badan-badan kredit tersebut adalah diterapkannya pendekatan sistem 'manajemen dari bawah', bukan program yang polanya disusun terpusat sebagai generalisasi pola-pola yang ada.

Dari uraian di atas dapat diperoleh gambaran bahwa beberapa pola kredit kecil yang dirancang khusus sesuai dengan permasalahan yang ada pada masyarakat miskin telah berhasil menjangkau sasarannya dan terbukti bahwa orang miskin cukup 'bankable'. Namun demikian masih diperlukan penelitian tentang sejauh mana kredit-kredit tersebut mampu meningkatkan pendapatan keluarga miskin.

Permasalahan lama yang sekarang masih dijumpai bersumber dari pihak perbankan maupun dari pihak debitur. Dari pihak perbankan pemberian kredit yang mengikuti azas-azas pemberian kredit sehat mensyaratkan antara lain kelayakan usaha nasabah, kemauan dan kemampuan membayar, serta jaminan kebendaan. Aspek-aspek yang dibutuhkan oleh perbankan tersebut sangat sulit dipenuhi oleh pihak debitur karena jarang pengusaha kecil mempunyai sistem akuntansi sebagai dasar penilaian

bank atas kelayakan usahanya. Di samping itu hampir tidak mungkin diharapkan pengusaha kecil apalagi rumah tangga miskin mampu menyediakan agunan sesuai kebutuhan (Susidarta, 1994). Selain itu, lembaga-lembaga kredit formal seperti BRI Unit Desa atau KUD baru berada di ibu kota kecamatan, padahal kelompok sasaran yang paling esensial adalah masyarakat miskin yang kebanyakan bermukim jauh di pelosok desa (P3PK UGM, 1990). Sedangkan dari pihak debitur, mengingat tingkat pendidikan masyarakat miskin pada umumnya sangat rendah sehingga belum terbiasa dengan prosedur birokrasi formal, timbul kesan pada mereka bahwa prosedur perbankan sangat sulit dan dengan demikian mereka enggan memanfaatkan fasilitas kredit formal. Hal ini merupakan salah satu faktor penyebab suburnya kegiatan para pelepas uang (rentenir) dan pengijon yang menyediakan kredit dengan prosedur mudah, tetapi bunganya sangat tinggi sehingga merugikan debitur.

Cukup menarik memperhatikan suatu teori lama yang memberikan penjelasan mengapa masyarakat miskin sulit melepaskan diri dari kredit dengan tingkat bunga yang sangat tinggi. Gonggrijp dalam Djojohadikusumo (1989), menyatakan bahwa kemiskinan mempunyai kecenderungan kuat untuk menaikkan suku bunga subyektif, yakni orang menilai satu '*gulden*' yang baru tersedia setelah jangka waktu tertentu. Hal ini sejalan dengan teori Fisher tentang "*time preference*", yang menyatakan preferensi akan penghasilan sekarang lebih tinggi dibanding dengan penghasilan yang akan datang. Hal ini sangat dipengaruhi oleh sifat pendapatan seseorang, jelasnya oleh empat unsur pendapatan yaitu : (1) besarnya arus penghasilan, (2) distribusi waktu dari arus pendapatan, (3) susunan arus penghasilan dan (4) tingkat risiko atau kepastian penghasilan. Ditinjau dari unsur-unsur pendapatan tersebut, penghasilan rumah tangga miskin sangat kecil; khususnya bagi petani, karena penghasilannya tidak tersedia secara teratur menyebabkan preferensi yang lebih tinggi terhadap 'penghasilan sekarang'.

Model Grameen Bank

Grameen Bank atau Bank Desa di Bangladesh didirikan oleh Prof. Muhamad Yunus yang mengajar ilmu ekonomi di Universitas Chittagong, diawali dari keprihatinan beliau akan nasib masyarakat miskin di Bangladesh. Dari hasil survei di desa Jobra, sebuah desa di dekat Universitas Chittagong pada tahun 1975, beliau menyimpulkan bahwa orang miskin sangat memerlukan kredit untuk meningkatkan kesejahteraannya, namun sistim perbankan dan perkreditan selama ini tidak dimaksudkan untuk melayani orang miskin. Semua transaksi dengan bank harus didukung dengan dokumen tertulis, padahal 80% penduduk Bangladesh buta huruf. Perbankan juga tidak dimaksudkan untuk melayani kebutuhan para wanita, apalagi bila mereka miskin dan buta huruf.

Dari hasil penelitian ini Prof. Muhamad Yunus mengadakan kaji tindak untuk membuktikan bahwa orang miskin sesungguhnya *bankable*. Dengan uang pribadinya, beliau memberi pinjaman kepada seorang wanita miskin untuk jual beli perhiasan terbuat dari plastik. Ternyata wanita tersebut mampu mengangsur pinjamannya setiap minggu dengan baik dan selanjutnya Prof. Muhamad Yunus memutar kembali angsuran tersebut kepada peminjam lainnya. Dengan adanya kucuran dana yang diperoleh dari bank, jumlah peminjam dapat ditingkatkan. Dari berbagai permasalahan serta solusi yang telah dilaksanakan selama periode kaji tindak, Prof. Muhamad Yunus beserta para mahasiswa yang membantunya terus mengembangkan model perkreditan untuk orang miskin. Model ini terus mengalami penyempurnaan, dan semakin menemukan bentuknya. Proses pengujian dan pengembangan model terus menerus dilakukan pada berbagai tipe daerah, mulai dari daerah yang mudah sampai pada daerah yang sulit dijangkau.

Pada tanggal 1 September 1983, proyek dengan kegiatan memberi pinjaman untuk orang miskin yang dirintis oleh Prof. Yunus resmi dijadikan bank dengan nama Grameen Bank berdasarkan ordonansi pemerintah. Pemerintah menyediakan 60% dari modal dasar yang disetor, sedangkan 40% modal berasal dari tabungan anggota. Pada saat peresmian itu Grameen Bank telah mempunyai 77 cabang yang meliputi 1025 desa yang berada di lima distrik (Pandu Suharto, 1991). Sejak itu Grameen Bank terus berkembang pesat. Pada bulan Mei 1994 atau setelah 10 tahun beroperasi sebagai bank, jumlah cabang telah menjadi 1042 meliputi 32243 desa dengan jumlah anggota 1.915.020 orang dan telah menyalurkan kredit sebesar 37 milyar taka atau US \$1 milyar (Grameen Bank Dialogue, 1994).

Keberhasilan Grameen Bank membantu masyarakat miskin di Bangladesh mendorong keinginan dari berbagai negara untuk mencoba menerapkan model bank ini di negara masing-masing. Grameen Bank banyak dikunjungi pejabat atau delegasi dari berbagai negara Asia Pasifik, Afrika, bahkan negara-negara kaya seperti Amerika dan Kanada untuk mempelajari model Grameen Bank serta saling bertukar pikiran tentang pelaksanaan kredit mikro bagi orang miskin. Sampai saat ini model Grameen Bank telah direplikasi di banyak negara, dan model ini sudah diuji coba pada berbagai kondisi daerah.

Pendekatan yang digunakan Grameen Bank adalah *bottom up planing*. Falsafah yang melandasi konsep ini adalah bahwa masyarakat desa mampu merencanakan dan menyelenggarakan proyek investasi yang produktif dengan bertumpu pada kondisi setempat maupun kemampuan sendiri. Grameen Bank tidak mengajarkan bagaimana mengembangkan usaha anggotanya, melainkan lebih bersifat sebagai stimulator dalam mengungkapkan dan mengembangkan daya kreatif dan semangat berusaha. Bantuan dana (kredit) dan konsultasi teknis yang diberikan lebih bermakna sebagai motor pendorong laju kegiatan ekonomi yang telah mereka pilih.

Di Indonesia model Grameen Bank telah dicoba oleh IBI (Institut Bankir Indonesia) dengan nama Karya Usaha Mandiri di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, sejak awal tahun 1989. Di Jawa Timur model ini di uji cobakan dalam kegiatan proyek yang diberi nama Mitra Karya East Java (MKEJ) oleh tim peneliti dari Universitas Brawijaya. Proyek ini baru dilaksanakan pada bulan Oktober 1993 di satu desa yaitu Desa Tangkil, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar. Daerah uji coba ditunjang dengan prasarana ekonomi yang cukup baik, peluang usaha diluar sektor pertanian besar, dan wilayahnya dekat dengan pasar kecamatan.

Pengukuran Efisiensi Operasional dan Kestinambungan

Untuk keperluan analisis dan evaluasi kinerja keuangan lembaga kredit mikro diperlukan indikator berupa rasio yang mencerminkan efisiensi operasioal dan kestinambungan keuangan lembaga. Indikator-indikator ini sangat mebanu manager untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan efisiensi operasionalnya.

1. Financial Sustainability Ratios.

Semua rasio dalam hal ini menggunakan informasi dari 3 laporan keuangan – Neraca, Laporan rugi-laba dan laporan protfolio.

Banyak rasio-rasio laporan keuangan mengukur efisiensi keuangan lembaganya. Salah satu cara yang bermanfaat untuk melakukan hal itu adalah mengukur keterkaitan dari arus pendapatan dan biaya terhadap aset yang digunakan oleh lembaga untuk mendukung arus penghasilan dan biaya. Besarnya biaya dan pendapatan bisa diperoleh dari laporan keuangan namun terdapat dua cara yang berbeda untuk menghitung aset yang digunakan. Dua denominator tersebut adalah rata-rata total aset dan rata-rata kinerja aset. Pilihan yang diambil tergantung pada struktur dan tujuan dari lembaga yang bersangkutan dan tingkat ketersediaan informasi.

2. Operating Efficiency Ratios.

Pada lembaga kredit mikro, 3 faktor kunci yang empengaruhi derajat kegiatan dan biaya operasional adalah:

- a. turnover dari portofolio pinjaman
- b. rata-rata besarnya pinjaman
- c. kematangan suatu institusi

Dampak dari tiga faktor diatas dan keterkaitannya dengan efisiensi operasi lebih lanjut bisa dianalisa melalui evaluasi terhadap biaya-biaya yang berhubungan dengan peminjaman per unit (dengan dasar biaya uang atau dengan dasar per pinjaman)

C. METODE PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Subyek penelitian adalah lembaga kredit mikro non bank milik Yayasan Mitra Karya yang berlokasi di kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar. Unit analisis dalam penelitian ini adalah sebuah lembaga kredit mikro yang telah beroperasi minimal 2 tahun dan khusus melayani pemberian bantuan modal kepada usaha-usaha kecil dari kelompok keluarga miskin di pedesaan.

Alat Analisis

Sesuai dengan tujuan penelitian digunakan model analisis keuangan menggunakan model SEEP dengan rasio-rasio sebagai berikut :

A. FINANCIAL SUSTAINABILITY RATIOS:

Return on Performing Assets	=	$\frac{\text{Financial income}}{\text{Avg. performing assets}}$
Financial costs ratios	=	$\frac{\text{Financial costs}}{\text{Avg. performing assets}}$
Loan loss provision ratios	=	$\frac{\text{Loan loss provision}}{\text{Avg. performing assets}}$
Operating costs ratios	=	$\frac{\text{Operating expenses}}{\text{Avg. performing assets}}$
Donation and grant ratios	=	$\frac{\text{Donation and grants}}{\text{Avg. performing assets}}$
Operating Self-sufficiency	=	$\frac{\text{Financial income}}{\text{Fin\&Op Costs + Provision}}$
Financial Self-Sufficiency	=	$\frac{\text{Financial Income}}{\text{Fin\&Op.costs + provision + Imputed C.C}}$

B. OPERATING EFFICIENCY RATIOS:

Costs per unit of Money lent	=	$\frac{\text{Operating costs}}{\text{Total amount disbursed}}$
Costs per Loan made	=	$\frac{\text{Operating costs}}{\text{\# loans made}}$
Number of active borrowers per credit officer	=	$\frac{\text{\# Active borrowers}}{\text{\# of loan officers}}$
Portfolio per credit officers	=	$\frac{\text{V alue of loans outstanding}}{\text{\# of loan officers}}$

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kaji Tindak

Dalam bab ini dikemukakan mengenai kelayakan serta kesinambungan hidup lembaga pemberi kredit khusus kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan menggunakan pendekatan model Grameen Bank (GB) dari Bangladesh sesudah diadakan beberapa penyesuaian dalam kaji tindak selama 2 tahun pertama. Pada dua tahun pertama, penelitian ini memfokuskan pada kesesuaian model GB untuk diterapkan pada beberapa karakteristik wilayah (miskin, tidak miskin, jauh dan dekat pusat kecamatan). Kesimpulan penting dalam kaji tindak pada dua tahun pertama adalah, model ini hakekatnya bisa diterapkan untuk berbagai wilayah, dengan karakteristik berbeda, asal didukung faktor eksternal yang kondusif, khususnya jalan dan sarana transportasi yang murah sehingga memberi peluang yang semakin besar pada usaha RTM untuk melakukan kegiatan usaha secara kontinyu diluar sektor pertanian. Penerapan model ini harus dikaitkan dengan sisi usaha RTM, yaitu kegiatan usaha yang memberi penghasilan tiap hari secara terus menerus (daily activity, daily income). Untuk wilayah yang tidak di dukung oleh syarat tersebut sehingga ekonomi RTM hanya tergantung pada sektor pertanian, baik sebagai petani gurem atau buruh tani yang bersifat musiman, model GB kurang sesuai untuk diterapkan, khususnya menyangkut kemampuan anggota untuk melakukan pertemuan dan angsuran secara teratur yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan, ketrampilan, pemecahan persoalan yang kesemuanya dilaksanakan dalam pertemuan mingguan, disamping pelaksanaan transaksi pinjam meminjam. Bila pertemuan mingguan tidak dapat dilakukan secara teratur bisa berimbas pada kelancaran angsuran serta tercapainya kelayakan usaha lembaga.

Laporan pada bagian ini terlebih dulu diawali dengan hasil temuan pada dua tahun pertama kaji tindak secara ringkas. Selanjutnya diadakan pengkajian kinerja khusus cabang Tangkil Wlingi yang sudah berjalan 3 tahun dan merupakan cabang paling lama. Kinerja ini diukur dari kemampuan lembaga menangani jumlah RTM binaan, besar pinjaman, pencapaian RTM yang sangat miskin dan kemampuan memberi pelayanan. Untuk mengukur kelayakan dan segi financial lembaga, digunakan indikator beberapa rasio keuangan yang menunjukkan kelayakan usaha (viability) serta tingkat efisiensi. Kemudian diuraikan mengenai sumberdaya manusia pendukung yang merupakan kunci penting keberhasilan lembaga untuk memberdayakan RTM serta dikemukakan alternatif bentuk lembaga yang sesuai.

Tingkat Efisiensi

Efisiensi proyek dapat diukur berdasarkan kemampuan staf lapangan untuk menyediakan jasa pelayanan keuangan serta perkembangan kelompok binaan dibawah supervisi. Tabel berikut menunjukkan tingkat efisiensi dan rasio beserta indikator yang digunakan.

Tabel 1. Tingkat Efisiensi Berdasarkan Jumlah Anggota Binaan dan Laporan Keuangan per Staf Lapangan di Cabang Wlingi, Blitar

Tahun	Sisa Pinang Pada tahun *berjalan (Rp)	Σ Anggota binaan per **Staf Lapangan (orang)	Σ Pinang per Staf Lapangan (Rp)	Tabungan per staf lapang (Rp)	Total layanan Keuangan per # staf lapang (Rp)
Sept 97	1.510.340.030	223	16.815.000	5.107.705	21.922.700
Sept 96	46.615.535	167	7.769.000	1.784.820	9.553.820
Sept 95	15.076.885	120	5.025.000	5.525.000	

Catatan:

* Jasa Pelayanan keuangan para petugas lapang

** Petugas lapang, petugas yang langsung berhubungan dengan anggota binaan

Jasa pelayanan keuangan per petugas lapang.

Sumber: Data primer diolah

Jumlah ini mendekati jumlah optimal pengendalian per staf. Penetapan jumlah optimal berdasarkan hasil percobaan kaji tindak tahun pertama dan kedua. Jumlah pihutang yang ditangani staf pada tahun kedua meningkat 3 kali dibanding tahun pertama dan pada tahun ke 3 meningkat 3 kali dibanding tahun kedua. Pengukuran efisiensi usaha juga bisa dilihat dengan menggunakan rasio antara biaya operasional dengan total nilai pelayanan keuangan (*Financial Service*) atau mengukur produktifitas setiap rupiah biaya operasional seperti tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Efisiensi Usaha Berdasarkan Rasio Biaya Operasional dan Nilai Produk Jasa Keuangan untuk Cabang Mitra Karya di Wlingi, Blitar

Tahun	Total Staf Cab. Wlingi	Total Staf Kantor Pusat	Ratio SW : KP	Biaya Op: Total FS* (%)	Biaya Total FS	Σ Anggota binaan (%)
1995	3	3	1	0,58	0	380
1996	6	3	2	0,31	0	998
1997	9	4	2,25	0,12	0	2008

Sumber: Data Primer diolah

Ukuran efisiensi lainnya juga dapat dilihat berdasar biaya operasional per 1 unit uang yang dipinjamkan, sebagaimana tercantum pada Tabel 3.

Tabel 3. Tingkat Efisiensi Usaha Cabang Wlingi Berdasar Produktivitas Aset dan Biaya per Unit Pinjaman

(1) Tahun	(2) Total aset* (rata-rata)	(3) Rasio Gaji, aset rata-rata	(4) Rasio biaya operasional dari aset rata-rata	(5) Total biaya Dana	Rasio 5 : 2	Pendapatan per Rp kredit & Investasi
1997	246.5 juta	0.11	0.16	3.000.000	0.012	0.295
1996	62 juta	0.175	0.27	1.105.923	0.017	0,30
1995	31 juta	0.18	0.31	750.000	0.024	0.05

Sumber: Data primer diolah

Efektifitas dan Tingkat Kemandirian Finansial

Penerimaan proyek terutama diperoleh dari bunga. Efektivitas penerimaan dapat diukur berdasar tingkat bunga yang dibebankan pada anggota, ketepatan mengangsur serta rata-rata jasa keuangan yang diberikan pada anggota. Makin tinggi tingkat bunga, makin tepat waktu angsuran serta makin besar jumlah jasa keuangan yang diberikan anggota, penghasilan lembaga makin Efektif. Tabel 4 memperlihatkan penerimaan serta efektifitas proyek.

Tabel 4. Penerimaan dan efektifitas proyek Mitra Karya Cab. Wlingi Blitar tahun

(1) Tahun	(2) Tk. Bunga (%)	(3) Pembayaran tepat waktu* (%)	(4) Piutang Ragu-ragu (%)**)	(5) Total Jasa Keuangan (Rp)	5/Total jasa keuangan (%)	Total jasa Keuangan per anggota
1997	30 %	98 %	0.43 %	36.716.396	18.6 %	98.359
1996	30 %	98.5 %	0.54 %	14.667.188	25.5%	57.400
1995	30 %	100 %	0 %	1.582.417	9.2 %	47.500

* = (Pokok pinjaman yang dibayar + bunga)/pokok pinjaman + bunga yang tahun tempo)

** = Bunga + pokok pinjaman yang tidak dibayar pada akhir jangka waktu pinjaman/saldo pihutang pada akhir tahun.

Sumber : Data primer diolah

Tingkat kemandirian oprational (*Operating Self Sufficiency*) dapat diukur berdasar efisiensi operasional, yang dinyatakan sebagai rasio antara pendapatan bunga dari anggota peminjam dibagi biaya total sesudah dikurangi penyusunan serta biaya dana/modal yang dibayar. Sedang kemandirian finansial secara total swadaya (*full financial self sufficiency*) diukur dengan menggunakan rasio antara penerimaan bunga dari anggota di bagi biaya operasional, bunga yang berlaku dipasar sesudah disesuaikan dengan inflasi. Tingkat kemandirian finansial proyek disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5.
Tingkat Kemandirian finansial proyek Mitra Karya, Cab Wiingi, Blitar

Sumber : Data Primer diolah

Tahun	Rata-rata biaya dana eksternal	Tabungan yang tersedia untuk pinjaman	Tingkat inflasi	Tingkat kemandirian finansial parsial	Tingkat kemandirian finansial Total
1997	3.5 %	30.3 %	9.80 %	133.90 %	88.32 %
1996	3.5 %	22.9 %	9.76 %	78.84 %	62.23 %
1995	-	9%	9.77 %	16.4 %	14.9 %

meningkatkan pendapatan RTM melalui bantuan pinjaman usaha serta bantuan teknis. Dengan bantuan pinjaman yang difokuskan pada wanita keluarga RTM diharapkan terjadi peningkatan produktifitas kerja wanita serta meningkatkan peluang kerja untuk masyarakat pedesaan pada umumnya. Proyek dengan skala kecil ini merupakan kaji tindak menggunakan pendekatan Bank Grameen secara murni pada tahun pertama, dan pada tahun kedua diadakan beberapa penyesuaian seiring dengan perluasan cakupan Wiayah binaan. Sampai tahun ketiga jumlah desa binaan sebanyak 35 desa dengan total anggota binaan sebesar 2.650 orang, tersebar pada 2 kabupaten. Besar pinjaman mulai Rp. 50.000,- sampai 400.000, dengan batasan untuk peminjam tahap I pada permulaan proyek (th 1995) maksimum boleh meminjam Rp. 75.000,- sedang mulai Desember 1997 diadakan penyesuaian menjadi Rp. 100.000,- mengingat adanya kenaikan harga secara umum. Supaya sasaran benar-benar terjangkau orang yang tepat, maka disamping digunakan ukuran batas garis kemiskinan BPS, secara operasional masih ditambah dengan indeks rumah dan nilai pemilikan aset. Seluruh anggota binaan (100%) adalah orang miskin yang bekerja sebagai buruh musiman di pertanian dan sektor informal. Selama 3 tahun proyek berjalan anggota mempunyai tabungan dengan kisaran Rp. 5000 bagi anggota yang baru masuk (belum 1 tahun) sampai Rp. 80.000 bagi yang sudah menjadi anggota 3 tahun. Keadaan ini menunjukkan bahwa anggota binaan secara perlahan tapi pasti, mampu meningkatkan ekonomi keluarganya.

Bila usahanya berjalan dengan baik, di samping mampu meningkatkan produktifitas kerjanya, dengan tabungan yang terkumpul mereka sebenarnya mampu membiayai perluasan usaha dengan modal sendiri.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, seluruh staf lapangan dan juga manager mendapat pelatihan dalam masa 3 bulan dari tim kantor pusat. Materi pelatihan ditujukan pada identifikasi daerah potensial, pendekatan pada orang-orang kunci baik formal maupun informal, pendekatan kepada calon anggota potensial, uji kelayakan calon anggota potensial, pembentukan kelompok, pembentukan serta pelaksanaan rebug pusat. Khusus bagi manager kantor cabang ditambah dengan latihan manajemen, mencakup manajemen personalia dan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta sistem pengendalian.

Untuk meningkatkan kualitas SDM pelaksana proyek, sebagian staf kantor pusat sudah mendapat pelatihan beberapa kali dari Grameen Trust, Grameen Bank dan CTS (CASHPOR Technical Service) mencakup seluruh aspek manajemen untuk lembaga yang bergerak dibidang pemberian kredit mikro khusus rumah tangga miskin. Berdasarkan pengalaman selama 4 tahun dapat disimpulkan bahwa sebelum mendirikan proyek pemberdayaan RTM, personil kantor pusat harus betul betul menguasai praktek lapangan, dan tidak cukup hanya dari teori atau membaca buku petunjuk.

Pelatihan juga dilakukan bagi calon anggota yang layak; dilaksanakan oleh staf lapangan selama 5 hari dalam bentuk latihan wajib kumpul. Isinya mencakup : memperkenalkan tujuan proyek, cara pengajuan, cara pembayaran, keharusan menabung, kedisiplinan kelompok, mengatasi permasalahan kelompok. Pelatihan diadakan siang atau sore hari selama 1 jam per hari, mengingat seluruh wanita calon anggota bekerja dari pagi sampai siang.

Jasa pelayanan yang diberikan pada anggota adalah pinjaman untuk usaha (general loan) serta tabungan kelompok. Semua anggota yang meminjam serta menabung masing-masing mempunyai buku setoran dan tabungan. Tiap buku mempunyai nama berbeda sesuai dengan besar pinjamannya. Buku ini berfungsi sebagai alat pengendali bagi anggota untuk mengetahui kesesuaian saldo pinjaman maupun tabungan yang ada dibuku anggota dengan saldo yang tercatat di Mitra Karya.

Kelayakan dan Kestinambungan Kantor Cabang

Pada tahun pertama pelaksanaan kaji tindak jumlah anggota mencapai 360 orang (selama 9 bulan) dengan menggunakan tenaga lapang 3 orang. Manager belum ada, langsung ditangani oleh tim kantor pusat dengan pertimbangan pada tahun pertama seluruh anggota tim pusat harus bekerja di lapangan, sambil melatih staf lapangan, menetapkan wilayah sasaran, pembentukan rebug serta realisasi pinjaman. Dengan jumlah anggota sebanyak 360 orang pada tahun I proyek hanya mampu menutup biaya operational sebesar 20%.

Pada tahun kedua anggota mencapai 998. Pendapatan bunga dari anggota walaupun belum mampu menutup seluruh biaya, tetapi sudah menutup 85%. Total biaya operational dan biaya modal dapat ditutup dari bunga pinjaman, saat anggota mencapai 1200 orang. Artinya diatas 1200 anggota usaha ini berada pada kondisi layak beroperasi karena mampu menghasilkan surplus. Asumsi yang dipakai adalah:

- » Kisaran pinjaman antara 75.000 - 150.000
- » *Tingkat angsuran minimal 95%*
- » *Rata-rata gaji staf tapang Rp. 175.000 (dengan kisaran antara Rp. 150 – Rp. 300 Ribu).*
- » *Jumlah Staf lapang dan manager 7 orang*
- » *Rata-rata jumlah anggota per staf lapang 200/Orang, maksimum 250.*
- » *Tersedia dana pinjaman lunak dengan bunga rata-rata 3,3% sampai 6%/th.*
- » *Tingkat bunga yang dibebankan anggota 2 ½% per bulan*
- » *Tabungan kelompok mendapat bunga sesuai dengan tingkat bunga umum di bank komersial.*

Rencana pengembangan kelompok baru bagi petugas lapang diberikan setiap bulan tergantung kepada senioritas dan kemampuan masing-masing staf. Bagi staf junior diberi tugas membentuk 1 sampai 3 kelompok per bulan, sedang bagi staf senior 4 sampai 6 kelompok per bulan. Pada tahun ke 3 proyek mencapai surplus sebesar Rp. 8,6 juta. Jumlah ini sebenarnya kurang realistis karena tenaga tim (3 orang) dari Kantor Pusat tidak diperhitungkan honorariumnya. Seandainya dibayar juga tidak adil bila ditanggung oleh satu kantor cabang. Karena proyek pemberdayaan ekonomi RTM bukan proyek komersial murni tetapi dilandasi oleh fungsi sosial yang lebih besar maka kantor cabang yang mempunyai 1500 ke atas dikenakan kontribusi untuk Kantor Pusat sebesar Rp. 500.000,- per bulan. Dengan demikian semakin banyak cabang yang layak (viable) berarti semakin besar kontribusi total yang diterima oleh kantor pusat untuk kepentingan biaya administrasi maupun honorarium staf kantor pusat dan pengembangan kualitas SDM. Bila digunakan opportunity cost jabatan manajer sesuai dengan Koperasi Unit Desa (KUD) sebesar Rp. 300 ribu per bulan, maka sesudah mempunyai 4 sampai 5 cabang, lembaga mampu membayar seluruh biaya operasional dan bunga modal, serta masih dapat menyisihkan sebagian surplus untuk pengembangan SDM dan kapasitas usaha, dengan membuka cabang baru.

D. KESIMPULAN

Dari pelaksanaan penelitian ini, telah diperoleh temuan penting sebagai berikut :

1. Dalam kaji tindak selama 2 ½ tahun yaitu pada saat jumlah anggota binaan mencapai 1200 orang, proyek berada pada posisi impas (Break Even Point) dengan asumsi jumlah binaan per staf lapang minimal 150 orang dan paling tinggi 250 orang, tingkat bunga sebesar 2 ½ % per bulan, waktu pelunasan 1 tahun dan nilai pinjaman rata-rata Rp. 100 ribu per anggota binaan.
2. Untuk mencapai tingkat kelangsungan hidup lembaga secara mandiri dalam jangka panjang, maka lembaga harus mampu menutup seluruh biaya termasuk biaya inflasi dan tidak menggantungkan pada dana hibah atau pinjaman lunak. Dari pengalaman dilapangan dengan anggota sebanyak 2000 dan kisaran pinjaman sebesar Rp. 150 ribu sampai Rp. 175 ribu proyek mampu menutup 85% total biaya termasuk imputed cost.
3. Tingkat kemampuan lembaga ini sangat ditentukan oleh kualitas SDM yang terlibat pada kegiatan ini; baik SDM ditingkat Kantor Pusat maupun pada tingkat kelompok anggota. Untuk staf lapang diperlukan karakteristik utama: berwatak sosial, jujur dan kreatif, berbadan sehat, mampu berkomunikasi dengan baik, maupun beradaptasi dengan pedesaan dan pendidikan minimal SMA.
4. Untuk membina dan mengembangkan usaha masyarakat miskin, karakter lembaga pembina yang sesuai adalah tidak birokratis, luwes, bersifat bottom up, mandiri, mempunyai pola perencanaan dan evaluasi yang jelas dan mempunyai kemampuan membangun sikap mental pengusaha kecil menjadi wirausahawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Danusaputra M. Cotler Y M, Suharto, P. 1991. *Monetisasi pedesaan, Bunga Rampai Keuangan Pedesaan*, LIPI Jakarta.
- Fuglesang, A. and Chandler, D. 1985. *Participation As Process, Norwegian Ministry of Development Cooperation - NOKAD*.
- Getubig I.P, Johari, MY, Kuger Thas A M, 1993 : *Overcoming Poverty Through Credit, the Asian Experience in Replicating the Grameen Bank*, Approach, ADPC, K.L Malaysia.
- Gibbons SD and Kasim S. 1991. *Banking or Rural Poor*, Grameen Bank, Dhaka 1216, Bangladesh.
-

- Gibbons SD and Kasim S. 1992. *Keluarga Termiskin Dipercayai*, Amanah Ikhtiar Malaysia, Universitas Sains Malaysia, P Penang.
- Gibbons, David S (1994), *The Grameen Reader, Training Materials for The Instructional Replication of the Grameen Bank Financial System for Reducation of Rural Poverty*, Chittagong, Bangladesh.
- Grameen Dialoque (1995), *Newsletter Published by The Grameen Trust*, No 24 Oktober, Bangladesh.
- Suharto, P.1991 *Perencanaan, Masalah dan Prospek Bank Perkreditan Rakyat*, LIPI, Jakarta.
- Susidarto, 1994, *Komitmen Perbankan Pada "si Kecil"*, Suara Merdeka, Jumat 28 Januari 1994.
- The SEEP Network, 1995, *Financial Ratio Analysis of Micro-Finance Institutions*, CALMEADOW, Pact Publications, New York
- Yunus M. 1989, *Strategy For the Decade Of Nineties*, Grameen Bank, Dhaka 1216, Bangladesh.